

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1.LATAR BELAKANG**

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan, hal ini karena pendidikan adalah hak asasi setiap warga Negara sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian dalam memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tersebut, menyelenggarakan program pendidikan yang berdampak positif untuk masyarakat sebagai sebuah bentuk pelayanan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Salah satu tantangan berat yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah adalah bagaimana menyeimbangkan pembangunan yang dapat menjangkau dan dinikmati oleh masyarakat yang mendiami wilayah terluar atau jauh dari pusat perkotaan dan di perbatasan. Konteks wilayah terluar atau Daerah yang jauh dari jangkauan perkotaan atau Pusat Pemerintahan adalah fakta sejarah yang memerlukan sinergisitas antara komponen, untuk memastikan semua layanan pembangunan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal yang penting, sebab dalam kurun waktu yang cukup panjang, kelompok kelompok masyarakat yang jauh dari akses informasi, komunikasi dan transportasi, kurang menikmati hasil hasil pembangunan secara merata dan berkeadilan (Kakyai dalam Omtu).

Dengan berkembangnya masyarakat yang semakin menuju kearah globalisasi, tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Pusat maupun Daerah harus lebih banyak membuat dan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, baik

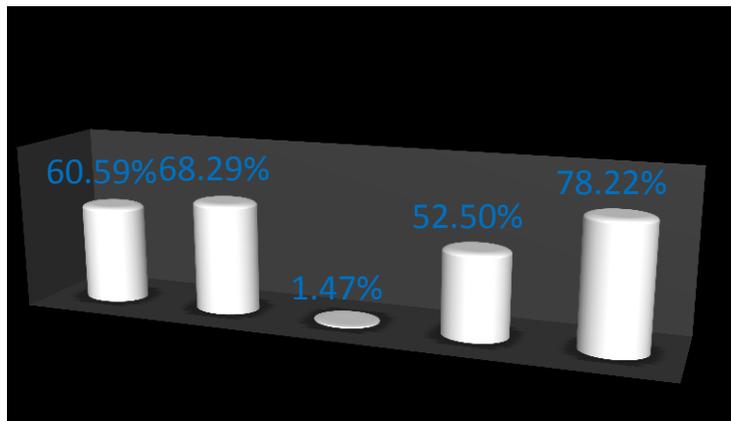
dalam bidang sosial, kesehatan maupun dalam bidang pendidikan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat Desa) dapat dipahami juga dengan cara pandang bahwa, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab Negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) Negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri,

menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses Pembangunan dan Pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Pada ahir tahun 2013 lalu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan membuat sebuah program dalam bidang pendidikan Sekolah Dasar yaitu program Gerakan Desa Cerdas. Gerakan ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan bekerjasama dengan Pengajar Muda Gerakan Indonesia Mengajar. Isjwan Hasyim, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, menuturkan bahwa alasan utama yang melatarbelakangi Gerakan Desa adalah tidak berimbangnya jumlah guru di Kota dan di Desa-Desa yang tersebar di pulau-pulau terpencil, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistim Pendidikan no 20 tahun 2003.

Berikut ini adalah presentase jumlah guru di kabupaten Halmahera Selatan sebelum adanya Program Gerakan Desa Cerdas(tahun 2011-2013):

Table I.1.Jumlah guru Sekolah Dasar, jumlah Sekolah Dasardan Rasio guru dan siswa dan angka partisipasi sekolah.



Prosentase Jumlah SD di Halsel	60.59%
Prosentase Jumlah Murid SD di Halsel	68.29%
Prosentase Jumlah Profesi Guru SD	1.47%
Prosentase Rasio Murid-Guru	52.50%
Angka Partisipasi Sekolah	78.22%
Sumber:BPS Halmahera Selatan 2015.	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan 2015.

Dari table diatas terlihat bahwa ada jarak yang sangat jauh antara jumlah murid Sekolah Dasar dengan jumlah profesi guru di Kabupaten Halmahera Selatan, dimana antara jumlah murid dan guru 68.29% jumlah murid Sekolah Dasar berbanding 1.47% jumlah guru Sekolah Dasar, ini tentunya jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu adanya inovasi dalam pelayanan pendidikan khususnya pendidikan Dasar agar tercapainya Pendidikan yang merata di semua wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Sedangkan di Kecamatan Kasiruta Barat, jumlah guru dengan jumlah murid juga tidak seimbang sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel.I.2.Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, 2013-2015.

Jumlah Sekolah Dasar	Jumlah murid	Jumlah guru
Tahun 2013 (11 Sekolah Dasar)	1.231	18
Tahun 2014 (11 Sekolah Dasar)	1.095	40
Tahun 2015 (11 Sekolah Dasar)	1.089	46

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan

2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa prosentasi jumlah guru Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kasiruta Barat tidak seimbang dengan jumlah siswa. Dengan adanya perbedaan jumlah guru dan siswa di kabupaten Halmahera Selatan seperti yang terlihat di atas maka besar harapan gerakan Desa Cerdas diharapkan mampu menjawab permasalahan kurang meratanya distribusi guru Sekolah Dasarserta timpangnya jumlah guru dan siswa tersebut.

Untuk indeks Pembangunan Manusia mulai pada tahun 2010 sampai dengan 2015 di kabupaten Halmahera Selatan belum

menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel.Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010-2015.

Indikator IPM	Indikator IPM					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (tahun)	64.61	64.64	63.65	64.65	64.93	65.03
Angka Harapan Lama Sekolah (persen)	10.55	10.67	11.15	11.18	11.32	11.91
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6.87	6.91	6.95	6.99	7.03	7.15
Pengeluaran per Kapita per bulan (000 Rp)	6.109	6.369	6.433	6.637	6.704	6.791
Indeks Pembangunan Manusia	58.22	58.86	59.50	59.92	60.34	61.26

Sumber :BadanPusatStatistik Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 belum mengalami peningkatan yang signifikan dari tiga indikator yang ada. Oleh karena itu dengan hadirnya Program Gerakan Desa Cerdas yang dipelopori oleh Pemuda Penggerak Desa (PPD) yang di akomodir oleh Pemerintah Kabupaten

Halmahera Selatan perlu untuk memperbaiki pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan.

Program ini mulai diimplementasikan pada tahun 2014 sebagai generasi pertama, 2015 sebagai generasi yang kedua dan tahun 2016 ini adalah generasi yang ketiga, Didalam proses implementasinya selama dua tahun awal mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, namun ada beberapa masalah yang perlu di benahi dalam proses implementasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tomi salah satu pemuda yang bertugas di Desa Kakupang pada periode kedua 2014 salah satu pelaksana Program Gerakan Desa Cerdas yang tergabung dalam pemuda penggerak Desa (PPD) yaitu, (pertama) adalah masalah akses jalan yang masih belum mendapatkan perhatian Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, serta masalah jaringan komunikasi yang belum menjangkau sekolah-sekolah yang menjadi sasaran Program Gerakan Desa Cerdas sehingga menyulitkan para guru untuk berkomunikasi dengan wilayah luar (kedua) adalah masalah ketersediaan buku-buku ajar yang terbaru serta alat peraga yang masih belum lengkap, sehingga para pengajar

menggunakan buku dan alat peraga seadanya, ini menjadi salah satu penghambat proses belajar yang dialami oleh dua generasi sebelumnya, dan yang (ketiga) adalah masalah sarana belajar/gedung sekolah yang masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, masih ada bangunan sekolah yang tidak layak, dengan atap dan tembok yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan siswa dan guru, sehingga proses belajar mengajar tidak efektif karena selalu dihantui oleh rasa takut. Hal inilah yang menghambat implementasi program gerakan Desa cerdas.

Beberapa masalah diatas menjadi alasan peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Gerakan Desa Cerdas di Sekolah Dasar Negeri Marikoko di Desa Kakupang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015.

## **I.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Program Desa Cerdas di SDN Marikoko Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Program Desa Cerdas di SDN Marikoko Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015?

## **I.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang peneliti cantumkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program Desa cerdas di SDN Marikoko Desa Kakupang,

Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Desa cerdas di SDN MarikokoDesa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.

## **I.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **I.4.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Desa (Ilmu pemberdayaan masyarakat Desa, ilmu kebijakan ) khususnya didalam bidang pendidikan dan kebijakan, mulai dari proses perencanaan sampai implementasinya serta menambah refrensi bagi penggiat pendidikan dalam rangka menghadirkan inovasi pendidikan kedepannya.

#### **I.4.2 Manfaat praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan sebagai bahan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera selatan serta pemuda penggerak Desa sebagai inisiator program Desa cerdas didalam melihat atau memahami dampak dari program Desa cerdas sehingga kedepannya program Desa cerdas bisa dievaluasi guna memberikan dampak yang lebih baik lagi terhadap kualitas pendidikan dasar yang ada di kabupaten Halmahera selatan.